

Nama : Indri Mutiara

NPM : 2523031001

Magister Pendidikan IPS

CASE STUDY PENGEMBANGAN KONSEP DASAR IPS PERTEMUAN 12

Di sebuah daerah pemilihan dalam pemilu legislatif terakhir, angka partisipasi pemilih muda (usia 17–25 tahun) hanya mencapai 45%, jauh di bawah target nasional. Selain itu, muncul laporan dari media lokal dan LSM mengenai praktik politik uang oleh beberapa calon legislatif (caleg), terutama di wilayah pedesaan.

Salah satu caleg terpilih bahkan diketahui memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada warga saat masa kampanye, namun lolos dari jerat hukum karena sulitnya pembuktian dan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu daerah.

Sementara itu, di sekolah-sekolah menengah atas di daerah tersebut, pendidikan kewarganegaraan dan IPS masih bersifat hafalan dan belum membahas isu-isu aktual tentang demokrasi, hukum, dan politik. Banyak siswa merasa tidak paham pentingnya menggunakan hak suara secara kritis dan bertanggung jawab.

Pertanyaan:

1. Analisislah bagaimana hubungan antara rendahnya partisipasi politik generasi muda dengan kurang optimalnya pendidikan kewarganegaraan dan IPS di sekolah!

Jawab :

Rendahnya partisipasi politik generasi muda di daerah pemilihan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kurang optimalnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan IPS di sekolah. Ketika proses belajar masih didominasi hafalan konsep tanpa dialog kritis atau studi kasus aktual, siswa tidak memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme demokrasi, pentingnya hak suara, serta dampak keputusan politik terhadap kehidupan mereka. Ketiadaan ruang untuk praktik langsung, seperti simulasi pemilu atau analisis kebijakan publik, membuat pengetahuan mereka bersifat abstrak dan tidak relevan dengan persoalan di lingkungannya. Dalam kondisi seperti ini, pemuda menjadi apatis karena tidak melihat hubungan nyata antara proses politik dan keseharian mereka, bahkan sebagian dari mereka tidak mampu menilai secara kritis praktik-praktik tidak etis seperti politik uang. Akibatnya, partisipasi politik generasi muda menjadi rendah, sementara kerentanan terhadap manipulasi politik justru meningkat.

- a) Pengetahuan sipil minim jika pembelajaran bersifat hafalan (konsep-konsep abstrak tanpa konteks), siswa tidak memahami mekanisme demokrasi (fungsi lembaga, hak & kewajiban, tata cara pemilu), sehingga mereka tidak tahu mengapa atau bagaimana berpartisipasi.
 - b) Keterampilan kritis lemah pembelajaran yang tidak melatih berpikir kritis, literasi media, atau cara menilai klaim politik membuat pemuda mudah termanipulasi (misinformasi, politik uang).
 - c) Keterlibatan praktis rendah tanpa pengalaman nyata (diskusi publik, simulasi pemilu, proyek komunitas), minat dan kompetensi untuk berpartisipasi drop.
 - d) Sikap dan nilai pendidikan yang tidak membahas etika politik, akuntabilitas, dan integritas tidak menumbuhkan norma anti-korupsi; siswa mungkin melihat politik uang sebagai “normal”.
 - e) Konteks lokal tidak diajarkan jika kurikulum tidak mengaitkan konten dengan isu lokal (mis. kasus caleg yang bagi-bagi sembako), siswa gagal mengaitkan pelajaran dengan realitas yang memengaruhi hak pilih mereka.
2. Jelaskan dampak jangka panjang dari pemberian praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia!

Jawab :

Pemberian terhadap politik uang dalam jangka panjang membawa konsekuensi serius bagi kualitas demokrasi dan penegakan hukum. Ketika praktik transaksional dalam kampanye dianggap lumrah dan tidak ditindak secara tegas, kepercayaan publik terhadap sistem politik perlahan terkikis. Politisi yang terpilih bukan lagi yang memiliki gagasan atau integritas terbaik, melainkan yang memiliki sumber daya finansial untuk “membeli” dukungan. Hal ini menciptakan distorsi kebijakan publik karena pejabat yang terpilih akan berusaha mengembalikan investasi politiknya melalui kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, bukan kepentingan masyarakat luas. Lebih jauh, budaya politik uang merusak fondasi etika politik dan memicu normalisasi korupsi di tingkat lokal maupun nasional. Dari sisi penegakan hukum, kegagalan pembuktian dan lemahnya pengawasan membuat hukum kehilangan wibawa, karena pelanggaran tidak dihukum dan para pelaku mengulangi praktiknya. Dampak paling berbahaya adalah rusaknya mekanisme regenerasi kepemimpinan, di mana calon berkualitas, bersih, dan berintegritas kalah oleh mereka yang memiliki modal besar.

Jika praktik politik uang dibiarkan, konsekuensinya sistemik:

- Erosi legitimasi demokrasi pemilu yang dipengaruhi uang melemahkan representasi rakyat; wakil yang terpilih bukan karena kualitas atau program, tetapi karena uang; rakyat kehilangan kepercayaan.
- Distorsi kebijakan publik caleg/politikus yang “membeli” dukungan cenderung mengembalikan investasi melalui kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu atau korupsi; agenda publik teralienasi.
- Normalisasi korupsi politik uang menyebarkan budaya transaksional di masyarakat; generasi muda memandang korupsi sebagai cara berpolitik yang wajar.
- Penegakan hukum melemah kegagalan penindakan (bukti sulit, pengawasan lemah) mengurangi *deterrant effect* pelaku terus mengulangi praktiknya.
- Ketimpangan akses politik sumber daya finansial menggantikan kompetensi; calon independen/berkualitas kalah bersaing, mengurangi pluralisme.
- Biaya sosial & ekonomi alokasi sumber daya publik bisa diselewengkan; biaya transaksi politik meningkatkan biaya politik (mengurangi efisiensi pemerintahan).

3. Tinjau kasus di atas dari tiga perspektif ilmu sosial (politik, hukum, dan kewarganegaraan). Bagaimana seharusnya ketiga bidang ini saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah tersebut?

Jawab :

Jika kasus ini ditinjau dari perspektif politik, hukum, dan kewarganegaraan, tampak bahwa ketiganya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dari perspektif politik, fenomena politik uang mencerminkan budaya patronase dan lemahnya institusi politik di daerah, sehingga interaksi antara caleg dan pemilih lebih bersifat transaksional daripada programatik. Dari perspektif hukum, terlihat adanya kesenjangan antara aturan yang telah mengatur larangan politik uang dengan kapasitas penegakan di lapangan; Bawaslu daerah tidak memiliki sumber daya yang cukup, prosedur pembuktian sangat sulit, dan masyarakat kurang memiliki keberanian atau mekanisme untuk melaporkan pelanggaran. Dari perspektif kewarganegaraan, rendahnya literasi demokrasi di sekolah mengakibatkan warga, khususnya generasi muda, tidak memahami hak-hak dan peran mereka dalam mengawasi jalannya pemilu. Ketiga disiplin ilmu ini sebenarnya harus berjalan secara bersinergi: pendidikan harus membentuk warga kritis yang menolak politik uang, hukum harus memastikan bahwa pelanggaran ditindak secara tegas, dan institusi politik harus memperbaiki transparansi serta integritas proses pencalonan. Sinergi ini hanya dapat

terjadi jika sekolah, lembaga hukum, partai politik, media, dan masyarakat sipil bekerja bersama dalam memperbaiki ekosistem demokrasi.

4. Usulkan sebuah program berbasis sekolah yang dapat meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa sebagai warga negara aktif dan kritis. Jelaskan unsur kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi evaluasinya!

Jawab :

Untuk menjawab persoalan tersebut, sekolah dapat mengembangkan sebuah program yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa sebagai warga negara yang aktif dan kritis. Program ini dapat berbasis pada kurikulum tematik yang mengintegrasikan materi demokrasi, hukum pemilu, dan literasi media ke dalam pembelajaran PPKn dan IPS. Materi tidak hanya berfokus pada konsep, tetapi juga mengaitkan isu-isu aktual di daerah, sehingga siswa mampu memahami konteks politik yang sedang berlangsung. Metode pembelajaran yang digunakan dapat berbasis proyek, simulasi, debat, dan layanan masyarakat, di mana siswa tidak hanya belajar tetapi juga mengalami praktik demokrasi secara langsung. Mereka dapat melakukan simulasi pemilu di sekolah, menganalisis kasus politik uang yang disederhanakan, berdiskusi dengan anggota KPU atau Bawaslu lokal, serta membuat kampanye publik tentang bahaya politik uang dan pentingnya partisipasi pemilih muda. Strategi evaluasi tidak hanya berupa tes pengetahuan, tetapi juga penilaian kinerja proyek, jurnal refleksi siswa, serta survei sikap sebelum dan sesudah program untuk melihat perubahan pemahaman dan kesadaran mereka. Melalui program semacam ini, sekolah dapat menjadi ruang pembentukan warga negara muda yang kritis, berintegritas, dan mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di daerahnya.